

## **KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDIA TERHADAP NEGARA-NEGARA ASEAN: IMPLEMENTASI *ACT EAST POLICY***

**Bastian Yunariono**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Email: bastian.yunariono@upnyk.ac.id

**Ariesani Hermawanto**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

### **ABSTRAK**

Redefinisi politik luar negeri *Look East Policy* menjadi *Act East Policy* dilatarbelakangi keinginan India untuk berintegrasi dengan negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. India berkomitmen melakukan tindakan nyata untuk bekerjasama dengan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis dalam berbagai bidang. Penelitian ini mengkaji implementasi *Act East Policy* dalam kerjasama ekonomi dan keamanan. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yang memungkinkan peneliti memahami permasalahan yang dihadapi manusia dalam konteks sosialnya. Sumber data menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, majalah surat kabar dan sumber internet yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Act East Policy* dalam bidang ekonomi terjadi peningkatan signifikan dalam volume perdagangan kedua pihak pasca diberlakukannya *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA). Dalam kerjasama perdagangan India mengalami defisit sehingga negara-negara ASEAN lebih banyak mendapatkan manfaat dibandingkan India. Dimasa mendatang India berpotensi menyeimbangkan neraca perdagangan mengingat keunggulan komparatif yang dimilikinya belum dieksplorasi secara mendalam Sedangkan Kerjasama keamanan memiliki dampak positif dalam memperkuat stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. India dinilai dapat berperan sebagai penyeimbang China yang berambisi menjadi kekuatan hegemonik di Asia Tenggara.

Kata Kunci : *look east policy, act east policy, AIFTA, keamanan*

### **ABSTRACT**

*The redefinition of India's foreign policy from Look East Policy to Act East Policy was motivated by India's desire to integrate with the countries in Southeast Asia that are members of ASEAN. India has taken concrete actions to collaborate as a strategic partner in various fields. This research examines the implementation of the Act East Policy in economic and security cooperation. The research methodology employed is qualitative, allowing the researcher to understand the challenges faced by individuals in their social context. Secondary data sources from credible books, journals, magazines, newspapers, and the internet were used. The research findings indicate that the implementation of the Act East Policy in the economic field has led to a significant increase in bilateral trade volume after the establishment of the ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). In trade cooperation, India has experienced a trade deficit, with ASEAN countries benefiting more than India. In the future, India has the potential to balance the trade balance considering that its comparative advantages have not been*

*explored in depth. Meanwhile, security cooperation has a positive impact in strengthening stability in the Southeast Asia region and beyond. India is considered to be able to act as a balancer to China, which has the ambition to become a hegemonic power in Southeast Asia. Security cooperation has a positive impact in strengthening stability in the Southeast Asia region and beyond.*

**Keywords :**

*look east policy, act east policy, AIFTA, security*

**PENDAHULUAN**

Tahun 2023 menandai lebih dari tiga dekade diterapkannya politik luar negeri *Look East Policy* yang kemudian berevolusi menjadi *Act East Policy* pada tahun 2014. Kebijakan luar negeri India ini diluncurkan pasca berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Pergeseran yang signifikan terjadi dalam politik luar negeri India menghadapi perubahan tatanan global. Keruntuhan Uni Soviet mendorong India untuk mengevaluasi kembali mitra strategisnya dalam kerjasama ekonomi, politik dan keamanan. Politik luar negeri India yang sebelumnya berorientasi pada hubungan baik dengan Uni Soviet bergeser ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Keruntuhan Uni Soviet mendorong India untuk membuka diri terhadap sesama negara Asia yang sebelumnya diidentikkan sebagai negara berkembang dalam tatanan ekonomi dan politik global (Moorthy & Subramaniam, 2017). Disisi lain, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. India melihat potensi menguntungkan untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Momentum India untuk mengintegrasikan diri dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur dirumuskan dalam politik luar negeri *Look East Policy* pada tahun 1993. Kebijakan ini menjadi orientasi politik luar negeri India untuk melibatkan diri dengan negara-negara di kawasan timurnya. Politik luar negeri yang dirumuskan Perdana Menteri Narashima Rao ini bersifat multidimensi yang melibatkan bidang ekonomi, sosial-budaya, politik dan keamanan. Orientasi politik luar negeri *Look East Policy* sebagai upaya India untuk mengembalikan hubungan baik dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur yang menurun selama era Perang Dingin.

India meluncurkan politik luar negeri *Look East Policy* sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali pentingnya kawasan Asia Tenggara dalam agenda kebijakan luar negerinya. Politik luar negeri *Look East Policy* untuk melengkapi hubungan sejarah dan budaya yang telah lama terjalin dengan kawasan lain di timur India (Bajpae, 2023). Kebijakan *Look East Policy* merupakan satu pendekatan bijak yang diambil India untuk menghadapi perubahan tatanan global pasca-Perang Dingin.

Integrasi ekonomi dan pertahanan keamanan India semakin diintensifkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang berasal dari *Bharatiya Janata Party*. Narendra Modi melakukan penguatan visi dan keterlibatan India di Asia Tenggara dan Asia Timur dengan melakukan redefinisi politik luar negeri *Look East Policy* menjadi *Act East Policy* atau Bertindak ke Timur yang dimulai tahun 2014. Narendra Modi berpendapat bahwa India perlu bertindak lebih pragmatis dan progresif dalam politik luar negerinya sebagai sarana mendukung pembangunan ekonomi dalam negeri. Diberlakukannya *Act East Policy* dapat dimaknai sebagai pergeseran strategis kebijakan luar negeri India dan upaya melakukan integrasi ekonomi India lebih mendalam dengan negara-negara tetangga di kawasan timurnya. Modi merevitalisasi orientasi politik luar negeri India berdasarkan komitmen India untuk meningkatkan posisinya di Asia Tenggara dan “rebranding” India dalam menegaskan keterlibatannya lebih dalam di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan *Act East Policy* dianggap sebagai versi modern dari *Look East Policy* yang sebelumnya diluncurkan Perdana Menteri P.V. Narasimha Rao (Bajpae, 2023; Paul, 2021).

Kebijakan *Act East Policy* menempatkan negara-negara Asia Tenggara yang terhimpun dalam ASEAN sebagai sentral atau pilar penting kebijakan luar negeri India. Perubahan orientasi politik luar negeri India menjadi *Act East Policy* didorong juga adanya peningkatan kerjasama ekonomi sebelumnya dengan negara-negara di Asia Tenggara. Terobosan besar keterlibatan India dalam kerjasama ekonomi ini adalah terbentuknya *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2010. Kerjasama ini menjadi langkah progresif dalam meliberalisasikan perdagangan India dengan negara-negara ASEAN yang bertujuan mewujudkan kemakmuran bersama. Perdagangan bebas ASEAN-India membuka peluang meningkatnya nilai perdagangan India dengan negara-negara ASEAN. Peningkatan ini terlihat dari volume perdagangan India dengan negara-negara ASEAN pada tahun 1993 yang bernilai US\$ 2,9 milyar meningkat menjadi US\$ 8 milyar pada tahun 2001 dan US\$ 42 milyar pada tahun 2009. Pertumbuhan volume perdagangan ini terus meningkat menjadi US\$ 80 milyar pada tahun 2018 hingga US\$ 131,5 milyar pada tahun 2022-2023. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen India bersama mitra negara-negara ASEAN untuk merealisasikan upaya mereka menuju masa depan yang lebih baik (Bajpae, 2023; Bhardwaj, 2023).

Selain dalam konteks ekonomi, India mempunyai kepentingan besar dalam bidang keamanan. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa kepentingan ekonomi dan keamanan India di Indo-Pasifik keduanya saling terkait erat (Indo-Pasifik merujuk istilah geopolitik yang sebelumnya disebut Asia Pasifik dan Lautan Hindia dengan penekanan wilayah perairan). Perspektif keamanan India di Indo-Pasifik dimulai dengan aspirasi India untuk lebih signifikan memberikan kontribusi bagi kerangka tatanan kerjasama keamanan regional (Ngaibiakching & Pande, 2020a). Dalam bidang keamanan India menjalankan kebijakan dengan mempererat kerjasama di sektor tersebut dengan negara-negara di

Asia Tenggara dan Asia Timur. Orientasi dalam bidang keamanan berdasarkan kenyataan bahwa masalah ini menjadi isu yang krusial bagi India.

Masalah keamanan yang dihadapi India berkaitan dengan ancaman dan tantangan yang menghambat India untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya menjadi negara yang stabil, terintegrasi dan makmur. Populasi India yang berjumlah 1,3 miliar ditandai dengan ketimpangan kemakmuran dan kemajemukan. Negara ini terdiri dari beragam etnis, budaya, dan agama yang sering kali mengakibatkan terjadinya konflik primordial (Malone, 2015).

Ancaman dan tantangan keamanan yang dihadapi oleh India berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Masalah keamanan dari lingkungan internal yang dihadapi India antara lain ancaman keamanan yang bersumber dari aksi terorisme di dalam negeri yang bersifat transnasional, ancaman dari gerakan pemberontakan (*insurgency*), kekerasan komunal, serta kejahatan terorganisir. Ancaman-ancaman keamanan ini sangat akut di wilayah-wilayah seperti Jammu dan Kashmir, negara-negara bagian Timur Laut, dan beberapa wilayah di India Tengah.

Dari lingkungan eksternal masalah keamanan muncul akibat perselisihan perbatasan dengan Pakistan dan China. Di wilayah perbatasan daratnya, India bersengketa dengan Pakistan dan China mengenai masalah klaim teritorial, yang seringkali menyebabkan ketegangan dan konflik. Sedangkan dalam konteks perimbangan kekuatan (*balance of power*) di Kawasan Asia Selatan, India terlibat persaingan militer dengan Pakistan terutama dalam kepemilikan senjata nuklir dan peningkatan kemampuan militer kedua negara. Di bagian lain, India juga menghadapi rivalitas dengan China yang meningkatkan pengaruhnya pada wilayah di luar China seperti di Asia Selatan dan Asia Tenggara. China mengembangkan pelabuhan dan proyek infrastruktur lainnya di Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Burma dan Bangladesh; membangun pangkalan angkatan laut di Burma; melakukan "investasi besar" di Afrika Timur (Malone, 2015).

India memerlukan kerjasama strategis untuk menjamin keamanan nasionalnya baik dari ancaman internal maupun eksternal. Untuk mengatasi masalah keamanan maka India memerlukan kerjasama dengan-negara di kawasan lain terutama negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Kerjasama dengan negara-negara ASEAN digunakan India untuk mempromosikan dialog dan perundingan mengenai mekanisme pengendalian senjata nuklir, mencegah munculnya China sebagai negara dominan yang mengancam keamanannya. Kerjasama dengan negara-negara ASEAN bertujuan mempertahankan stabilitas politik dan perdamaian di tingkat regional. Tulisan ini membahas mengenai implementasi kebijakan luar negeri India yaitu *Act East Policy* dalam kerjasama ekonomi dan keamanan dengan negara-negara ASEAN.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Politik luar negeri pada hakekatnya merupakan visi suatu negara untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam tatanan internasional. KJ Holsti mendefinisikan politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi yang menjadi pedoman para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi eksternal. Orientasi ini dibentuk berdasarkan sikap, persepsi dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam tatanan internasional (Holsti, 1992).

Sebagai bagian dari masyarakat internasional menyebabkan orientasi politik luar negeri India dibentuk oleh nilai-nilai, pengalaman sejarah dan posisi geografis India. Pengalaman sejarah India memiliki ikatan historis dengan negara-negara di lingkungan timurnya. India tidak dapat mengisolasi diri dari lingkungannya secara geo-ekonomi dan geo-strategis. Sehingga arah politik luar negeri India tidak hanya ditentukan oleh lingkungan domestik tetapi juga dipengaruhi lingkungan eksternal yang berubah secara dinamis (Anwer, 2017).

Era globalisasi ditandai semakin meningkatnya interaksi antara satu negara dengan lainnya dan antara negara dengan aktor non-negara. Keniscayaan suatu negara untuk mengabaikan tatanan internasional yang terbentuk baik dalam skala regional maupun global. James Rosenau (1974) menyatakan bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan suatu mekanisme negara untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan internal menciptakan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap lingkungan eksternal. Esensinya bahwa kebijakan yang bersifat adaptif merupakan dimensi utama suatu negara untuk keberlangsungan hidup.

Dalam perspektif adaptif semua negara bangsa dapat dipandang sebagai suatu entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Perspektif adaptif memusatkan perhatiannya pada proses tindakan adaptasi suatu negara sebagai suatu respon terhadap lingkungan eksternal dan internal yang berubah dengan berpijak pada penilaian dari negara tersebut tentang kapabilitas yang dimiliki dan posisi geografisnya.

Terdapat empat pola adaptasi kebijakan luar negeri yang dikembangkan Rosenau (1981), yaitu (1) *preservative adaption* (responsif terhadap perubahan dan permintaan dalam lingkungan internal dan eksternal); (2) *Acquiescent adaption* (responsif terhadap perubahan dan permintaan eksternal); (3) *intransigent adaption* (responsif terhadap perubahan dan permintaan internal); (4) *promotive adaption* (tidak responsif terhadap perubahan dan permintaan internal dan eksternal).

Berdasarkan perspektif di atas politik luar negeri *Act East Policy* yang dicanangkan Narendra Modi merupakan adaptasi India dalam menjaga keberlangsungan hidup negara tersebut dengan memperhatikan perubahan di dalam negeri dan lingkungan sekitarnya. Dinamika pembangunan

ekonomi India dalam dua dekade terakhir membutuhkan orientasi politik luar negeri yang lebih dalam dan proaktif untuk terlibat di lingkungan timurnya. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN tumbuh dinamis. Faktor lain perubahan lingkungan adalah kebangkitan ekonomi-militer China menjadi tantangan India untuk menjadi kekuatan penyeimbang negara Tirai Bambu tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjelaskan implementasi politik luar negeri India *Act East Policy* terhadap negara-negara Asia Tenggara, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dalam konteks sosialnya. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan memberikan gambaran yang menyeluruh dan kompleks terhadap kondisi sosial yang terjadi (Creswell, 2018). Sehingga melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kebijakan India terhadap negara-negara Asia Tenggara dengan fokus implementasi di bidang ekonomi dan keamanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sumber data sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan, majalah dan surat kabar. Sumber data lainnya adalah sumber internet yang kredibel. Sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan model yang dikembangkan (Miles, 1992) yang menyatakan terdapat tiga alur dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jangkauan penelitian ini difokuskan pada tahun 2014 yang menjadi tahun diterapkannya kebijakan *Act East Policy* hingga tahun 2023 yang menjadi batas akhir waktu penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Evolusi dari *Look East Policy* Menjadi *Act East Policy***

Pada awal dekade 1990-an India meluncurkan kebijakan *Look East Policy* atau "Melihat ke Timur" sebagai upaya untuk menghidupkan kembali arti penting Asia Tenggara dan Asia Timur dalam agenda luar negerinya. Tujuan kebijakan tersebut untuk memperat kembali hubungan yang telah lama terjalin antara India dengan negara-negara di kawasan timurnya. Dalam interaksi awal hubungan India dengan negara-negara Asia Tenggara terbangun sejak pra-kolonial yang ditandai hibriditas budaya di berbagai negara di Asia Tenggara. Hubungan diantara dua entitas budaya ini semakin erat karena

didukung persamaan konsepsi persaudaraan sesama bangsa Asia yang mengalami pengalaman bersama di era kolonialisme (Nanda, 2003).

Selanjutnya pada masa Perang Dingin hubungan India dengan negara-negara di Asia Tenggara tidak mendalam. Hubungan India lebih dekat ke Uni Soviet yang merupakan negara maju dan memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pembangunan India. Sedangkan Asia Tenggara diidentikkan sebagai kawasan negara-negara berkembang sehingga India tidak memprioritaskan hubungan mendalam dengan negara-negara di timurnya. Para perumus kebijakan luar negeri India pun memandang dalam konstelasi geo-politik bahwa negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN merupakan wilayah pengaruh dan hasil bentukan Amerika Serikat.

Namun skenario ini berubah pasca Perang Dingin yang ditandai runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989. Runtuhnya Uni Soviet membawa implikasi besar bagi hubungan luar negeri India dengan mitra utamanya. Peran Uni Soviet sebagai mitra dagang terbesar, investor, pemasok minyak mentah dan pelindung India dari tekanan internasional terkait isu Kashmir dan non-proferasi nuklir tidak didapatkan kembali. Runtuhnya Uni Soviet memberikan kerugian besar bagi India dalam bidang politik, ekonomi dan keamanan (Moorthy & Subramaniam, 2017; Paul, 2021).

Disisi lain lain dalam tatanan regional negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand tumbuh sebagai kekuatan ekonomi di Asia yang mengesankan sehingga mendapatkan julukan Ekonomi Macan Asia. Negara-negara yang diistilahkan sebagai Macan Asia tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas lima persen pertahun dalam beberapa dekade dan ditopang industrialisasi berorientasi ekspor.

Perkembangan lain yang mendorong India untuk mengevaluasi kebijakan luar negerinya adalah terbentuknya blok-blok perdagangan di berbagai kawasan. India tidak dapat melepaskan diri dari globalisasi dan kecenderungan regionalisme ekonomi atau blok-blok perdagangan. Terbentuknya forum kerjasama *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik menandakan kecenderungan regionalisme ekonomi yang berlangsung di lingkungannya. India akan terisolasi dan tertinggal dari negara sekitarnya jika tidak mengikuti dinamika regionalisme.

Faktor domestik turut mendorong India untuk memformulasikan kembali paradigma politik luar negerinya. Pada tahun 1991 Perdana Menteri Narashima Rao dan didukung Menteri Keuangan Manmohan Singh melakukan reformasi ekonomi India dengan mengadopsi sistem ekonomi pasar yang berlandaskan keterbukaan dan liberalisme. Reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintahan Narashima Rao meninggalkan pembangunan ekonomi model Nehru (*Nehruvian*). Model pembangunan Nehru meletakkan sistem pembangunan ekonomi yang berpusat pada pemerintah. Seluruh aktivitas ekonomi nasional berada di bawah kendali pemerintah, sedangkan pihak swasta

yang dapat menjalankan usaha terbatas pada pengusaha nasional yang memiliki *Lisensi Raj* (sertifikasi Raja) atau sertifikasi dari pemerintah untuk menjalankan usaha tertentu.

Terhadap dunia luar India menerapkan kebijakan proteksi serta industri substitusi impor. India tidak mengimpor barang dari luar negeri dan campur tangan asing dalam perekonomian tidak diperlukan sehingga pemerintah menggalakkan produksi dalam negeri sebagai sumber penghasilan negara. Program tersebut sejalan dengan semangat *swadeshi* yang dikemukakan Mahatma Gandhi.

Dampak diberlakukannya sistem ekonomi Nehru yang bersifat protektif India mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi India antara tahun 1951 hingga 1990 rata-rata sebesar 3,5% pertahun. Fenomena tersebut menimbulkan istilah *Hindu Rate Growth*, istilah yang merujuk pada kondisi stagnasi pertumbuhan ekonomi India selama empat dekade. Pertumbuhan yang lambat diikuti rendahnya peningkatan pendapatan perkapita yang rata-rata sebesar 1,3% pertahun. Tingkat pertumbuhan ini berlawanan dengan perekonomian negara-negara Asia seperti Taiwan dan Korea Selatan yang tumbuh mengesankan dengan rata-rata diatas 5 persen pertahun pada dekade 1990-an (The Times of India, n.d.).

Dalam ekonomi model liberal pasca-reformasi India tidak dapat mempertahankan kebijakan ekonomi dengan mengisolasi diri sistem perekonomiannya dari peran swasta nasional maupun asing sebagaimana periode *Nehruvian*. Kebijakan yang harus ditempuh India selain membuka diri pasar domestik dari masuknya produk dan investasi asing adalah dengan membangun kembali hubungan baik dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Perubahan lingkungan internal dan eksternal mendorong India untuk merekonstruksi politik luar negerinya. Pada tahun 1991 Narashima Rao meluncurkan Kebijakan *Look East Policy* atau "Melihat ke Timur". Konsep *Look East Policy* pertama kali disampaikan Narashimao Rao pada kuliah di Singapura dengan menyatakan "India menjalin hubungan baru dengan negara-negara di wilayah ini (Asia Tenggara) " tahun 1994. Konsep tersebut kemudian dieksplisitkan dalam Laporan Tahunan Kementerian Luar Negeri India tahun 1996. Konsep *Look East Policy* secara substansi adalah India yang berwawasan ke luar, menggunakan kekuatan domestik untuk bersinergi dengan lingkungannya di Asia. Kebijakan Melihat ke Timur merupakan persepsi dan harapan India terhadap Asia dan lingkungan internasional yang berubah. Kebijakan *Look East Policy* merupakan kebijakan luar negeri India yang memandang penting wilayah Asia Tenggara untuk melengkapi hubungan sejarah, budaya dan keagamaan yang telah berlangsung beberapa abad. Kebijakan ini untuk mengembangkan hubungan politik dan mengintegrasikan ekonomi India dengan lingkungannya di Asia Tenggara dan Asia Pasifik (Bajpae, 2023; Paul, 2021; Roy, 2020).

GVC Naidu berpendapat orientasi kebijakan *Look East Policy* yang dijalankan India adalah mengintegrasikan India dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Pendekatan yang

dilakukan India khususnya melalui upaya membangun kembali hubungan politik dengan negara-negara Asia Tenggara, meningkatkan integrasi ekonomi melalui perdagangan, iptek dan pariwisata. Pendekatan lain yang dikembangkan India dengan cara mempromosikan kerjasama pertahanan-keamanan dengan negara-negara di timurnya (Paul, 2021).

Dua dekade setelah berjalannya *Look East Policy* secara progresif India meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kawasan di timurnya memiliki arti strategis secara geo-ekonomi dan geo-strategis. Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj menyatakan bahwa pemerintahan Narendra Modi akan memperdalam kebijakan yang diluncurkan sebelumnya. Kebijakan *Look East Policy* yang telah dijalankan tiga pemerintahan sebelumnya yaitu Narashima Rao, Atal Bihari Vajpayee dan Manmohan Singh dinilai tidak memadai untuk meningkatkan peran India di lingkungannya yang berkembang dengan dinamis. India seharusnya "*act east*", atau bertindak lebih riil ke timur tidak hanya terbatas pada tataran "*look east*".

Redefinisi politik luar negeri dari *Look East Policy* menjadi *Act East Policy* ditegaskan Narendra Modi pada KTT India-ASEAN yang ke-12 di Myanmar pada tahun 2014. Perdana Menteri India yang ke-14 menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

"...the intensity and the momentum with which we have enhanced our engagement in the East, is a reflection of the priority that we give to this region. A new era of economic development, industrialization and trade has begun in India. Externally, India's Look East Policy has become 'Act East Policy' (The Indian Express, n.d.)

Pernyataan yang disampaikan Narendra Modi merefleksikan keinginan India untuk melibatkan diri lebih dalam terhadap negara-negara di kawasan timurnya. India melihat keberhasilan pembangunan ekonomi kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur menjadi peluang dan sarana India untuk meningkatkan ekonominya pasca diterapkannya *Look East Policy*. India akan tertinggal dan terabaikan jika tidak mengintegrasikan diri lebih dalam dan intens dengan kawasan di timurnya.

Morthy & Kavaramma Subramaniam menyatakan politik luar negeri *Act East Policy* merupakan era baru politik luar negeri India yang dibangun dengan mengikuti dinamika perubahan negara-negara di timurnya yang berkembang secara dinamis. India mentransformasikan kebijakan *Look East Asia* menjadi *Act East Asia* sebagai sarana untuk mengintegrasikan India lebih cepat dan mendalam dengan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur dan Australia. Kebijakan ini merupakan kelanjutan atau satu langkah di depan *Look East Policy* dan bertujuan untuk meningkatkan peranan proaktif India terhadap lingkungan di timurnya (Moorthy & Subramaniam, 2017).

Dalam melakukan politik luar negeri India menempatkan posisi negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN sebagai "sentralitas" kebijakan luar negerinya. Negara-negara ASEAN berfungsi strategis bagi India karena berperan sebagai "jangkar India" untuk lebih luas berinteraksi dengan negara-negara Asia Pasifik dan global. Negara-negara ASEAN merupakan batu loncatan India untuk berinteraksi dengan kawasan yang lebih luas seperti Jepang, Korea dan Australia. Kerjasama India dengan dengan negara-negara ASEAN mudah terealisasi karena terdapat persamaan sejarah, budaya, agama, tingkat pembangunan dan jumlah penduduk yang besar (Mishra, 2019; Palit, 2016)).

Di sisi lain, redefinisi politik luar negeri India menjadi *Act East Policy* dipengaruhi keinginan India untuk menjadi kekuatan penyeimbang (*balance of power*) China di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan dimensi ekonomi China tumbuh menjadi kekuatan dominan di Asia. Sejak diterapkannya reformasi ekonomi pada tahun 1980 China tumbuh menjadi kekuatan ekonomi global. Misalnya, pada tahun 2022 China memiliki produk domestik bruto (PDB) sebesar US\$ 17,96 triliun atau peringkat kedua di dunia setelah Amerika Serikat dengan PDB sebesar US\$ 25,43 triliun (The World Bank, 2023).

Kebangkitan China menimbulkan situasi keterancaman India dari negara tirai bambu tersebut yang masif menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Rivalitas dan situasi keterancaman India terhadap China beralasan mengingat kedua negara mengalami beberapa kali konflik terkait isu perbatasan. Konflik tentang perbatasan antara China dengan India terjadi pada tahun 1962, 1967 dan terus berlangsung hingga tahun 2020. Konflik-konflik tersebut mendorong India untuk menerapkan strategi pertahanan aktif atau diplomasi koersif (Bajpae, 2023).

Melalui kemajuan dan kekuatan ekonomi yang dimiliki, China memiliki pengaruh signifikan terhadap negara-negara di Asia Tenggara. Negara Tirai Bambu tersebut gencar dalam menjalankan kebijakan luar negerinya seperti *One Belt, One Road* (OBOR) yang kemudian berganti nama menjadi *Belt and Road Initiative* (BRI). Kebijakan yang diluncurkan pada tahun 2013 ini berusaha untuk mengembangkan pengaruh ekonomi, politik dan keamanan dengan negara di ASEAN. China secara progresif melakukan kerjasama perdagangan, investasi, bantuan teknis kepada negara-negara ASEAN. Misalnya pada tahun 2018 nilai perdagangan China ASEAN mencapai angka US\$ 479,4 milyar atau 17,1% dari total perdagangan barang ASEAN dan Investasi Asing Langsung sebesar US\$ 10,2 milyar atau 6,6 % dari total Investasi Asing Langsung ASEAN (Ganapathi, 2019).

Sedangkan dalam bidang keamanan maritim persaingan India dan China di Asia Tenggara antara lain dipengaruhi isu Selat Malaka. Sebagian besar komoditas perdagangan dan pasokan sumber energi China melalui Selat Malaka, sehingga "pengamanan" selat tersebut menjadi agenda penting China. Negara tersebut berpendapat bahwa jika suatu negara mampu mendominasi Selat Malaka berpotensi menjadi ancaman kelancaran perdagangan dan keamanan energi China saat ini

dan di masa mendatang. China memandang Selat Malaka sebagai bagian dari "String of Pearls" atau untaian mutiara disamping Selat Hormuz dan Lautan Hindia (Moorthy & Subramaniam, 2017).

Disisi lain pembangunan ekonomi India juga dipengaruhi aktivitas perdagangannya di Selat Malaka. Berbagai barang dari dan ke India menggunakan jalur yang terletak diantara Indonesia dan Malaysia tersebut. Selat Malaka berperan sebagai "sea link" atau lautan penghubung dari Lautan Hindia, Laut Andaman dan Lautan Pasifik. Selat Malaka juga berfungsi sebagai jalur singkat yang menghubungkan India dengan dengan Asia Timur dan kawasan lainnya sehingga jalur ini menjadi "choke point" atau titik sempit yang strategis bagi India (Moorthy & Subramaniam, n.d.).

Pertimbangan geo-ekonomi dan geo-strategis (keamanan) diatas mendorong India untuk menjadi kekuatan penyeimbang China di Asia Tenggara. Ambisi India untuk menjadi penyeimbang China diprediksi lebih mudah tercapai. Negara-negara ASEAN menganggap India lebih ramah dibandingkan China. India dapat berinteraksi lebih mendalam dengan negara-negara di timurnya tanpa dipengaruhi isu-isu yang berpotensi mengganggu kepercayaan kedua pihak. Sedangkan hubungan China dengan negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia dengan China dipengaruhi hubungan yang kurang baik terkait Laut China Selatan. China dinilai bersikap ekspansif dengan meluaskan wilayah maritimnya di Laut Cina Selatan yang kaya dengan potensi alam. Klaim perluasan teritorial oleh China menimbulkan konflik dengan beberapa negara ASEAN. Konflik laut China Selatan menyimpan kecurigaan laten negara-negara ASEAN terhadap peran China dalam pengelolaan keamanan regional Asia Tenggara (Bajpae, 2023; Palit, 2016).

Berdasarkan paparan diatas redefinisi politik luar negeri India menjadi *Act East Policy* merupakan sikap adaptif India dalam merespon perubahan-perubahan di lingkungannya. Disamping kebutuhan India untuk meningkatkan kemajuan pembangunan ekonominya adalah kemajuan negara-negara Asia Tenggara. Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang tumbuh menjadi kekuatan ekonomi di Asia. Perubahan lain yang mendorong India bersikap adaptif adalah keinginan negara tersebut untuk menjadi kekuatan penyeimbang kekuatan China yang berambisi menjadi kekuatan dominan dalam tatanan regional Asia Tenggara. Bahasan berikut menjelaskan implementasi *Act East Policy* dalam bidang ekonomi dan keamanan yang menjadi orientasi politik luar negeri India era Narendra Modi.

### **Kerjasama Ekonomi India dengan ASEAN**

Keterlibatan India dalam kerjasama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mendapatkan momentum pasca diterapkannya kebijakan *Look East Policy* yang bertransformasi menjadi *Act East Policy*. Kerjasama ekonomi ini diawali ketika India diterima menjadi Mitra Dialog Sektoral pada tahun 1992. Hubungan kedua pihak semakin membaik dengan

diterimanya India menjadi Mitra Dialog Penuh pada tahun 2002. Perkembangan selanjutnya termanifestasikan dalam kesepakatan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif ASEAN-India pada tahun 2003. Dalam perjanjian di Bali tersebut disepakati komitmen kedua pihak untuk menghilangkan hambatan tarif sebagai *roadmap* menuju perdagangan bebas negara-negara ASEAN dan India.

Terwujudnya perdagangan bebas ASEAN-India atau *ASEAN India Free Trade Area* (AIFTA) terealisasi setelah ditandatangani di Bangkok pada tahun 2009. Pada tahun 2010 secara berkelanjutan India dengan negara-negara Asia Tenggara yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Myanmar dan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi untuk meliberalisasikan perdagangan India – ASEAN dengan penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Secara substansi AIFTA mengurangi tarif lebih dari 90% produk atau 4.000 produk dari India dan ASEAN. Dalam kerangka AIFTA India dan negara-negara ASEAN secara bertahap mengurangi dan menghilangkan bea masuk. Blok perdagangan ini selanjutnya menandatangani Perjanjian Perdagangan Jasa dan Investasi dengan India pada tahun 2014 (Nandal, 2018a).

Kesepakatan AIFTA menjadi jalan terbentuknya salah satu kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dengan populasi sekitar 1,9 miliar jiwa. Terealisasinya perjanjian tersebut diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk India sebagaimana orientasi kebijakan *Look East Policy* yang dicanangkan Narashima Rao. Kesepakatan AIFTA menjadi fondasi India untuk mengintegrasikan ekonominya lebih dalam ke negara-negara Asia Tenggara yang berada di timurnya (Anggerwal, 2019).

Perkembangan perdagangan India – ASEAN dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Volume Perdagangan India dengan ASEAN**

<b>India – ASEAN (milyar US\$)</b>	<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>	<b>2018-19</b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>	<b>2021-22</b>	<b>2022-23</b>
Ekspor	30.96	34.20	37.47	31.55	31.49	42.32	44.00
Pertumbuhan (%)	23.19	10.47	9.56	-15.82	-0.19	34.43	3.95
Impor	40.62	47.13	59.32	55.37	47.42	68.08	87.57
Pertumbuhan (%)US\$)	1.77	16.04	25.86	-6.66	-14.36	43.57	28.64
Total (milyar)	71.58	81.34	96.80	86.92	78.90	110.4	131.57
Keseimbangan Perdagangan (Milyar US\$)	-96	-12.93	-21.85	-23.82	-15.93	-25.76	-43.57

Sumber : (Ministry of Commerce and Industry India, 2023).

Berdasarkan data di atas terjadi dinamika volume perdagangan India dengan negara-negara ASEAN dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan kemajuan signifikan. Pada tahun 2016-2017 volume ekspor India ke negara-negara ASEAN senilai US\$ 30.96 milyar dengan impor sebesar US\$ 40,62 milyar. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 ekspor India meningkat menjadi US\$ 44 milyar sedangkan impor menjadi US\$ 87.57 milyar. Angka tersebut menunjukkan bahwa disatu sisi terjadi peningkatan volume perdagangan India dengan negara-negara ASEAN namun India mengalami defisit perdagangan yang melebar.

Pada tahun 2019-2020 dan 2020-2021 terjadi penurunan pada ekspor dan impor India terhadap negara-negara Asia Tenggara. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya permintaan domestik dan global serta persaingan dagang AS-China yang berimbas terhadap perdagangan India dengan 10 mitra negara ASEAN. Namun demikian secara keseluruhan terdapat peningkatan yang positif dalam hubungan perdagangan India dengan ASEAN.

Data lain menjelaskan bahwa setelah berjalan satu dekade pelaksanaan AFTA volume perdagangan India dengan negara-negara ASEAN menjadi dua kali lipat. Pada tahun 2010 volume perdagangan India-ASEAN senilai US\$ 57 milyar, selanjutnya pada tahun 2021-2022 senilai US\$ 131 milyar. Dari volume tersebut ekspor India meningkat dari US\$ 25,63 milyar pada tahun 2010-2011 menjadi US\$ 43,51 milyar pada tahun 2022-2023. Sedangkan impor India juga mengalami peningkatan dari US\$ 30,61 milyar pada tahun 2010-2011 menjadi US\$ 87,59 milyar pada periode yang sama. Dengan demikian terjadi defisit pada neraca perdagangan India dalam periode satu dekade pasca pelaksanaan AFTA (De, 2023; Ravi, 2020)

Dari perspektif kerjasama bilateral perdagangan India dengan negara-negara ASEAN terdapat dalam tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Volume Perdagangan India dengan Negara-negara Anggota ASEAN**

Negara	Ekspor (juta US\$)				Impor (Juta US\$)			
	2020-21	2021-22	2022-23	Pertumbuhan (%)	2020-21	2021-22	2022-23	Pertumbuhan (*)
<b>Singapura</b>	8675.5	11150.81	11992.94	7.55	13304.92	18962.19	23595.35	24.43
<b>Indonesia</b>	5026.21	8471.51	10024.30	18.33	12470.17	17702'83	28820.41	62.80
<b>Malaysia</b>	6057.68	6995.04	7156.16	2,30	8373.05	12424.2	12734.94	2,50
<b>Vietnam</b>	4999.64	6702.67	5909.16	-11.84	6120.66	7438.52	8794.73	18.23
<b>Thailand</b>	4237.59	5751.30	5709.81	-0.72	5682.27	9332.59	11193.36	19.94
<b>Philipina</b>	1457.30	2107.24	2094.15	-065	572.47	729.12	959.59	31.61

<b>Myanmar</b>	772.56	893.03	807.00	-9.63	526.79	1001.87	954.74	- 4.70
<b>Kamboja</b>	168.8662.91	198.37	220.43	11.12	3935	94.88	146.02	53.89
<b>Brunei</b>	62.91	43.16	69.4 8	60.99	329.25	394.44	303.99	- 22.93
<b>Laos</b>	27.34	14.65	16.08	15.90	1.70	0.80	74.30	-

Sumber : (Ministry of Commerce and Industry India, 2023).

Data diatas menunjukkan lima mitra utama perdagangan India dengan negara-negara ASEAN yaitu Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Dari komoditas yang diekspor India ke negara-negara ASEAN meliputi bahan-bahan mineral seperti besi setengah jadi, dan aluminium, kapal, farmasi, perhiasan, tenun dan hasil-hasil olahan pertanian seperti gula dan daging kerbau. Sedangkan impor India dari ASEAN antara lain perlengkapan elektronik, mesin, bahan-bahan kimia, minyak mentah, batu bara, biji tembaga, hasil pertanian seperti minyak sawit, kapas dan karet. Dalam komoditas pertanian terdapat saling komplementer antara produk pertanian India dengan negara-negara ASEAN. Komoditas yang diimpor dari negara-negara ASEAN seperti bahan-bahan kimia, biji besi dan batu bara yang penting untuk kebutuhan industri manufaktur di India (Nandal, 2018b).

Setelah lebih dari satu dekade pelaksanaan AIFTA menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara mendapat manfaat lebih besar dibandingkan India. Dalam implementasi AIFTA, kelebihan negara-negara ASEAN disebabkan kemampuan negara-negara ASEAN di bidang teknologi industri khususnya sektor manufaktur yang lebih tinggi dan didukung sistem pemasaran yang lebih efisien dibandingkan India. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan posisi perdagangan India berada dalam keadaan yang tertekan (Anggerwal, 2019; Ravi, 2020).

Namun demikian berbagai pihak meyakini di masa depan India dapat menyeimbangkan neraca perdagangannya dengan negara-negara Asia Tenggara. India memiliki keunggulan komparatif yang berpotensi untuk dikembangkan seperti layanan teknologi informasi dan farmasi (Handique, 2021) . Keunggulan komparatif India tersebut belum dikembangkan secara maksimal. Dalam bidang teknologi informasi India merupakan salah satu eksportir layanan terbesar dalam teknologi informasi global. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti IBM, Microsoft, Infuis Infosys dan lainnya memanfaatkan talenta teknologi informasi India yang mempekerjakan 5 juta orang dengan kualifikasi internasional. Kota Bangalore di negara bagian Karnataka menjadi pusat pengembangan teknologi informasi dunia yang fenomenal. Pada tahun 2021-2022 nilai total ekspor jasa India sebesar US\$ 254,5 miliar, ekspor teknologi informasi memberikan kontribusi lebih dari 60% atau senilai US\$ 157 miliar. Kekuatan India di bidang teknologi informasi tersebut berpotensi untuk dikembangkan dalam kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara di masa depan (Sukegawa,

2021).

Keunggulan komparatif lainnya yang berpotensi dikembangkan India dalam hubungan perdagangannya dengan negara-negara ASEAN adalah industri farmasi. Didukung oleh ilmuwan yang berkualitas dan tradisi riset yang baik sehingga dalam dua dekade ini industri farmasi India tumbuh menjadi kekuatan global. India menjadi salah satu penyedia obat generik dan obat paten terbesar dengan menguasai 20% volume pasar global. Bahkan industri vaksin India melayani permintaan 50% pasar global baik ke negara-negara maju maupun negara berkembang (Ahlawat & Associates, 2022). Kemampuan memproduksi obat-obatan dengan biaya rendah dengan kualitas standart internasional menjadi peluang industri farmasi India untuk memasuki pasaran Asia Tenggara. Perdagangan farmasi selama penerapan AFTA, India lebih banyak mengeksport ke negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, dalam bentuk bahan baku obat-obatan.

Optimisme bahwa Asia Tenggara menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa India di masa depan adalah potensi ekonomi yang dimiliki kawasan di timurnya tersebut. Pada tahun 2021 negara-negara Asia Tenggara memiliki total jumlah penduduk sebesar 663.850.3 jiwa merupakan "pasar besar" yang potensial untuk pengembangan produk-produk India. Besarnya populasi tersebut didukung oleh GDP sebesar US\$ 3,3 triliun dengan kemajuan ekonomi yang mengesankan. Angka ini menempatkan ASEAN sebagai ekonomi regional terbesar ketiga di Asia dan peringkat kelima ekonomi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, China, Jepang dan Jerman (ASEAN, 2023; Giri, 2023). Berbagai kelebihan tersebut menjadi keuntungan India untuk terlibat lebih dalam melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di timurnya sebagaimana orientasi politik luar negeri India *Act East Policy* yang bersifat adaptif menyikapi perubahan di lingkungannya.

Berdasarkan paparan di atas bahwa India telah mengimplementasikan politik luar negeri *Act East Policy* dalam bidang ekonomi. Hingga menjelang satu dekade pelaksanaan pelaksanaan *Act East Policy* secara progresif India telah terintegrasi dengan pasar ASEAN melalui AFTA. Perjanjian AFTA merupakan "terobosan besar" India untuk meningkatkan integrasi ekonominya terhadap pasar Asia Tenggara untuk masa mendatang. Meskipun perdagangan ASEAN-India mengalami ketidakseimbangan, namun hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi persahabatan jangka panjang yang nilainya lebih dari sekedar defisit perdagangan yang sifat temporal dan dinamis. Hal ini membuktikan bahwa hubungan perdagangan India dengan negara-negara Asia Tenggara yang pernah terjalin baik di masa lalu terulang kembali pada masa kini dan menjadi harapan dimasa depan. Persamaan sosial-budaya dan pengalaman sejarah menjadi faktor pendukung terjalinnya perdagangan dan persahabatan India dengan negara-negara di timurnya.

### **Kerjasama Keamanan**

Dimulai dari politik luar negeri *Look East Policy* pada tahun 1992 dan mengalami peningkatan menjadi *Act East Policy* pada tahun 2014 menunjukkan bahwa India telah meredefinisikan politik luar negerinya menjadi bersifat lebih strategis, termasuk dalam bidang keamanan. Dalam konteks ini, India melakukan kebijakan yang bersifat substansial dan meningkatkan peran sertanya secara langsung terhadap negara-negara ASEAN. Dalam bidang keamanan, hubungan kerjasama yang lebih erat dan strategis ini, baik yang bersifat regional, multilateral maupun bilateral, memungkinkan India melakukan politik luar negeri yang lebih konkrit untuk menjamin keamanan dan kepentingan nasional India. Pada KTT ASEAN-India tahun 2015 yang diadakan di Kuala Lumpur, para pemimpin ASEAN menyuarakan apresiasi terhadap *Act East Policy* India dan menyetujui bahwa *Act East Policy* dapat melengkapi upaya pembangunan komunitas ASEAN (Ngaibiakching & Pande, 2020b).

Kerjasama di bidang keamanan menjadi isu yang bersifat fundamental dalam dialog dengan negara-negara ASEAN. Hal ini karena India perlu memperkuat posisinya di kawasan Asia Tenggara dalam rangka membina kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual cooperation*), sekaligus merespon ancaman-ancaman yang timbul dan merugikan India. Pada bulan Desember 2015 Menteri Negara Urusan Luar Negeri India, VK Singh menyatakan bahwa tujuan kebijakan "*Act East*" adalah untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, hubungan budaya, dan mengembangkan hubungan strategis (keamanan) dengan negara-negara di wilayah Asia-Pasifik melalui keterlibatan yang berkesinambungan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Dalam kaitannya dengan keamanan, hal tersebut menunjukkan bahwa kemitraan yang saling menguntungkan menjadi sasaran kebijakan luar negeri India. Diplomasi yang terbuka memberikan kerangka kerja yang luas dan berkelanjutan dalam rangka merespon isu-isu strategis dalam hal keamanan (Analisation, 2019).

Dinamika strategis global menunjukkan bahwa wilayah Indo-Pasifik muncul sebagai daerah yang ekonominya tumbuh pesat namun di bagian lain muncul sebagai wilayah yang panas dalam ranah politik internasional. Pada saat Amerika Serikat dipandang semakin memfokuskan pada kepentingan dalam negerinya dan lebih bersifat isolasionis, China tumbuh sebagai kekuatan dominan di Indo-Pasifik karena kekuatan militer dan ekonominya. China telah mengganggu status quo di Laut China Timur, Laut China Selatan serta di sepanjang perbatasan India. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan China seperti *Belt and Road Initiative* untuk mewujudkan "*Chinese Dream*" yang menyebabkan kecurigaan terhadap politik luar negeri China yang ekspansif. India memandang bahwa keterlibatannya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik diperlukan untuk menjadi pengimbang terhadap kekuatan China yang bersifat hegemonik dan koersif. Oleh karena itu India perlu membangun kerjasama keamanan yang kuat dan saling menguntungkan dengan negara-negara ASEAN.

Kerjasama keamanan India dengan negara-negara ASEAN dilakukan baik secara multilateral dan bilateral. Dimulai dengan kebijakan luar negeri India yaitu *Look East* pada tahun 1992 dimana India menjadi mitra dialog ASEAN, kerjasama tersebut semakin meningkat dan India muncul sebagai mitra yang strategis. Dalam perkembangannya pada tahun 2014, India mengubah kebijakan luar negeri *Look East* menjadi kebijakan *Act East*, yang menunjukkan bahwa India memberikan prioritas penting dalam kerjasamanya dengan ASEAN. Selain kerjasama dalam bidang politik dan ekonomi, kerjasama dalam bidang keamanan menjadi elemen penting dalam dialog India dengan negara-negara ASEAN. Baik India maupun ASEAN mempunyai alasan untuk bermitra mengingat semakin pentingnya tantangan transnasional seperti perubahan iklim, pandemi, terorisme, dan munculnya ancaman dan risiko digital secara online terhadap stabilitas regional (Nachiappan, 2021).

Kerjasama keamanan antara India dengan negara-negara ASEAN memerlukan tindakan proaktif dan substansial. Hal ini disebabkan negara-negara ASEAN mengalami peningkatan ancaman dan tantangan dalam bidang keamanan tradisional maupun non-tradisional, serta telah mengembangkan respons untuk mengatasi hal tersebut. Negara-negara ASEAN melakukan kebijakan luar negeri dan keamanan multi-vektor untuk mengurangi dampak negatif dari lingkungan keamanan yang tidak stabil dan kompleks di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Sebagian negara di Asia Tenggara berada di bawah pengaruh ekonomi yang dominan dari China seperti Indonesia, Kamboja dan juga Laos; sementara Filipina, Thailand, dan Singapura secara cermat seimbang dalam menjaga kemitraan aliansi mereka dengan Amerika Serikat seiring menjalin hubungan dengan China. Akan tetapi, kesatuan di antara anggota ASEAN terus terpengaruh secara negatif oleh kebijakan koersif dari China.

India meningkatkan kerja sama politik dan keamanan dengan negara-negara ASEAN diperluas untuk mencakup seluruh wilayah Indo-Pasifik. Hal ini tidak lepas dari adanya aktivitas militer China di Laut China Selatan yang merupakan pelanggaran terhadap aturan internasional. Oleh karena itu, dalam masalah keamanan maritim, India dan ASEAN menekankan pada terjaminnya keamanan di Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Kedua perairan ini merupakan jalur perairan strategis yang penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan tidak hanya negara-negara pesisir tetapi juga seluruh dunia yang bergantung pada kebebasan navigasi dan keamanan jalur komunikasi laut (Banlaoi et al., 2013). Dalam situasi demikian, negara-negara ASEAN cenderung mengikuti pendekatan yang tidak mendorong mereka untuk berpihak pada China atau Amerika Serikat. Oleh karena itu, India dan ASEAN memiliki tujuan strategis untuk mencegah munculnya kekuasaan hegemonik yang mendominasi wilayah ini.

Kehadiran dan kerjasama India di kawasan Asia Tenggara dapat menjadi penyeimbang terhadap pengaruh China yang semakin kuat. Hal ini mencerminkan upaya India untuk memperkuat

hubungan keamanan dengan negara-negara ASEAN, yang dapat memperkuat citra India sebagai negara penyeimbang yang baik di wilayah tersebut. Kerjasama ini dianggap menguntungkan oleh sebagian besar anggota ASEAN yang mendukung kerjasama keamanan yang bersifat saling menguntungkan dengan India.

Pada Januari 2018, diadakan Pertemuan Peringatan Hubungan India-ASEAN (*Indian-ASEAN Commemorative Summit*) di New Delhi setelah 25 tahun berkomunikasi. Selain ekonomi dan konektivitas, kerjasama politik dan keamanan menjadi agenda terpenting yang diuraikan dalam Pernyataan Bersama setelah pertemuan tersebut. Kedua belah pihak menyatakan tekad mereka untuk bekerja sama secara erat dalam isu-isu keamanan regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama, serta memastikan arsitektur regional yang terbuka, transparan, inklusif dan berdasarkan aturan. Selain itu, semua pemimpin ASEAN menginginkan India untuk memainkan peran yang lebih tegas di kawasan Indo-Pasifik yang strategis, sambil mengakui bahwa New Delhi semakin mendapat pengakuan dalam memastikan perdamaian dan stabilitas regional (*Of The Asean-India Commemorative Summit To, 2020*).

Sejumlah hal penting dapat dikemukakan dari *Indian-ASEAN Commemorative Summit* tahun 2018 tersebut yaitu : (1) Menandai pentingnya hubungan antara India dan negara-negara ASEAN, setelah 25 tahun keterlibatan yang kuat. Pertemuan ini mencerminkan kerja sama yang semakin erat antara India dan negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang diantaranya bidang keamanan. (2) Isu-isu politik dan keamanan menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak merasa perlu untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan keamanan regional dan global, dan untuk memastikan arsitektur regional yang sesuai dengan aturan dan inklusif. (3) Pemimpin ASEAN mengakui peran penting India dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara dan Indo-Pasifik yang strategis. Hal ini mengindikasikan pengakuan terhadap posisi India dalam hal keamanan regional dan pengaruhnya yang semakin meningkat. (4) Pertemuan tersebut menekankan pentingnya transparansi, inklusivitas dan aturan dalam arsitektur regional. Hal ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa kerja sama regional didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Pada intinya, Pertemuan Peringatan Hubungan India-ASEAN pada tahun 2018 menekankan pentingnya kerjasama politik dan keamanan, serta peran India dalam menjaga stabilitas regional serta mengedepankan prinsip-prinsip kunci seperti transparansi dan aturan (*Of The Asean-India Commemorative Summit To, 2020*).

Kerja sama antara India dan ASEAN dalam bidang keamanan memiliki dampak positif dalam memperkuat stabilitas di kawasan Asia. Hal ini mencerminkan komitmen bersama mereka untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan yang ada di wilayah ini melalui dialog, kerja sama dan diplomasi. Kerja sama ini penting dalam menjaga stabilitas regional, mengatasi ancaman keamanan

bersama, dan mempromosikan perdamaian di wilayah tersebut. Kerja sama antara India dan ASEAN dalam bidang keamanan merupakan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Upaya ini juga mencerminkan peran India sebagai mitra strategis yang penting bagi ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, terutama dalam konteks geopolitik yang terus berubah di kawasan Asia. Kerja sama ini memiliki potensi besar untuk memperkuat integritas dan ketahanan keamanan di Asia Selatan dan Asia Tenggara, serta mendorong pembangunan dan perdamaian di seluruh wilayah tersebut.

## **KESIMPULAN**

Politik luar negeri *Act East Policy* merupakan kebijakan luar negeri India yang bersifat adaptif mengikuti dinamika di kawasan timurnya. India bersikap realistis dan pragmatis meletakkan orientasi politik luar negerinya kepada negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara mendorong India untuk lebih dalam melakukan integrasi dengan negara-negara tersebut. Dalam formulasi yang lebih jauh India menempatkan negara-negara ASEAN sebagai "jangkar India" untuk memasuki kawasan Asia Pasifik dan tatanan global. Dimensi lain yang mendorong India untuk berintegrasi lebih dalam dengan negara-negara ASEAN sebagai upaya negara tersebut mengimbangi pengaruh China yang ekspansif terhadap negara-negara di Asia Tenggara.

Dalam kerjasama ekonomi India dengan negara-negara ASEAN sebagai implementasi *Act East Policy* menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan volume perdagangan kedua pihak pasca diberlakukannya AFTA. Namun demikian negara-negara ASEAN mendapat manfaat lebih besar dibandingkan India dengan volume perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan India. Namun demikian pada masa mendatang India berpotensi menyeimbangkan neraca perdagangan karena memiliki keunggulan komparatif yang belum dieksplorasi secara maksimal seperti jasa pelayanan teknologi informasi dan industri farmasi.

Stabilitas keamanan regional dan terjaminnya keamanan maritim di Selat Malaka, Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan menjadi orientasi India dalam melakukan kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN. Kedua perairan ini merupakan jalur perairan strategis yang penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan India. Dalam kerjasama keamanan kehadiran India mudah diterima negara-negara ASEAN. India dipandang lebih ramah terhadap negara-negara ASEAN dibandingkan China yang menghadapi persoalan Laut Cina Selatan dengan negara-negara ASEAN.

Makna penting dalam kerjasama ekonomi dan keamanan India dengan negara-negara Asia Tenggara sebagai implementasi politik luar negeri *Act East Policy* adalah terwujud hubungan yang lebih mendalam antara India dengan negara-negara ASEAN. Persamaan sosial-budaya dan

pengalaman sejarah menjadi faktor pendukung terjalannya persahabatan India dengan negara-negara di timurnya sesama bangsa Asia.

## **REFERENSI**

- Ahlawat & Associates. (2022, May 27). *Development of Pharmaceutical Industry in India*. <https://www.ahlawatassociates.com/blog/development-of-pharmaceutical-industry-in-india/>.
- Analisation, R. A. (2019). *India 's Act East Foreign Policy*. 11, 216–219.
- Anggerwal, D. (2019). *From President Desk, Introduction: India'a Trade and Investment Opportunities With ASEAN Economies*.
- Anwer, T. (2017). India's Foreign Policy: An Overview. In B. Mohanty (Ed.), *India's Foreign Policy* (pp. 3–59). Tripura University.
- ASEAN. (2023). *ASEAN Statistical Year Book 2022. December*, 1–275.
- Bajpae, C. (2023). Reinvigorating India's 'Act East' Policy in an age of renewed power politics. *Pacific Review*, 36(3), 631–661. <https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2110609>
- Banlaoi, R. C., Delhi, N., Dialogue, D., & Nations, S. A. (2013). *Challenges in India- Asean Security Cooperation*. 1–6.
- Bhardwaj, N. (2023). *Boosting India-ASEAN Economic Collaboration*. Bhar. <https://www.aseanbriefing.com/news/boosting-india-asean-economic-collaboration-key-highlights-from-pm-modis-12-point-proposal/>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- De, P. (2023, June 20). Reactivating the ASEAN-India Partnership through an FTA. *Hindustan Times*.
- Ganapathi, M. (2019). Act East in India's Foreign Policy: India-ASEAN Relations. *Indian Foreign Affairs Journal*, 14(3), 195–206.
- Giri, W. (2023, September 7). *Pasar Besar Bernama ASEAN*. <https://Indonesia.Go.Id/Ragam-Asean-2023/7488/Pasar-Besar-Bernama-Asean?Lang=1>.
- Handique, Chumki. (2021). The India ASEAN Free Trade Agreement (AIFTA). *Turksih Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*, Vol, 12(Isuue 1), 5329–5337.
- Holsty, K. (1992). *International Politics: A Framework for Analysis* (6th ed., Vol. 0). Prentice Hall Inc.
- Malone, D. M. (2015a). India's Contemporary Security Challenges. In *Does the Elephant Dance?* <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199552023.003.0003>
- Malone, D. M. (2015b). India's Contemporary Security Challenges. In *Does the Elephant Dance?* <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199552023.003.0003>
- Miles, M. B. & H. A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Ministry of Commerce and Industry India. (2023, September 2). *Foreign Trade (ASEAN)*. <https://Commerce.Gov.in/about-Us/Divisions/Foreign-Trade-Territorial-Division/Foreign-Trade-Asean/>.

- Mishra, R. (2019, August). *India and The Philippines Time to Go Beyond The ASEAN Framework*. [https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2019/08/PR190801\\_India-and-Philippines.Pdf](https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2019/08/PR190801_India-and-Philippines.Pdf).
- Moorthy, R., & Subramaniam, K. (2017). Moorthy, Ravichandran dan Subramaniam. *Jebat: Malaysian Journal of History & Strategic Studies*, 44(2), 51–72.
- Nachiappan, K. (2021). India–ASEAN Relations: Riding and Transcending the “Indo-Pacific” Wave. *The Journal of Indian and Asian Studies*, 02(02), 1–17. <https://doi.org/10.1142/s2717541321400040>
- Nanda, P. (2003). *Rediscovering Asia: Evolution of India’s Look East Policy*. Lancer Publisher & Distributor.
- Nandal, H. (2018a). *The aftermath of asean-india free trade agreement (aifta) and future prospects*. 8(3), 45–54.
- Nandal, H. (2018b). *The aftermath of asean-india free trade agreement (aifta) and future prospects*. 8(3), 45–54.
- Ngaibiakching, & Pande, A. (2020a). India’s Act East Policy and ASEAN: Building a Regional Order Through Partnership in the Indo-Pacific. *International Studies*, 57(1), 67–78. <https://doi.org/10.1177/0020881719885526>
- Ngaibiakching, & Pande, A. (2020b). India’s Act East Policy and ASEAN: Building a Regional Order Through Partnership in the Indo-Pacific. *International Studies*, 57(1), 67–78. <https://doi.org/10.1177/0020881719885526>
- OF THE ASEAN-INDIA COMMEMORATIVE SUMMIT TO. (2020). 1–11.
- Palit, A. (2016). Indias Act East Policy and Implications for Southeast Asia. *Southeast Asian Affairs*, SEAA16(1), 81–94. <https://doi.org/10.1355/aa16-1f>
- Paul, S. (2021). *India’s shift from Look East Policy to Act East Policy*. 20(1), 2138–2143. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.01.234>
- Ravi, N. (2020, January). *A Decade and More of the India-ASEAN FTA*. <https://aseanindiacentre.org.in/sites/default/files/2022-02/AIC%20Commentary%20No%2024%20December2021.pdf>, <https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1806612>.
- Roy, N. (2020). Evaluating India’s Look-East Policy: Challenges and Opportunities Under Upa Rule. *Asian Affairs*, 51(3), 642–655. <https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1806612>
- Sasi, A. (n.d.). ‘Look East’ has become ‘Act East Policy’, says PM Modi at ASEAN summit | India News - The Indian Express. Retrieved November 16, 2023, from <https://indianexpress.com/article/india/india-others/look-east-has-become-act-east-policy-pm-modi-at-asean/>
- Sukegawa, S. (2021). ASEAN’s initiatives for free trade in East Asia under AEC. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(1), 42–64. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1902068>
- The Times of India. (n.d.). Explainer: What is “Hindu rate of growth” and why Raghuram Rajan’s remarks may be “premature” - Times of India. [http://timesofindia.indiatimes.com/Articleshow/98482598.Cms?utm\\_source=contentofinterest&utm\\_medium=text&utm\\_campaign=cppst](http://timesofindia.indiatimes.com/Articleshow/98482598.Cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst)
- The World Bank. (2023). *GDP (Current US \$) - China*. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN>